

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Kejahatan (*crime*) merupakan tingkah laku yang melanggar hukum dan melanggar norma-norma sosial, sehingga masyarakat menentanginya.<sup>1</sup> Dalam konteks sosial, kejahatan merupakan fenomena sosial yang terjadi pada setiap tempat dan waktu.<sup>2</sup> Hal ini menunjukkan bahwa kejahatan bukan saja merupakan masalah bagi suatu masyarakat tertentu yang berskala lokal maupun nasional, tapi juga kejahatan telah menjadi masalah yang dihadapi oleh seluruh masyarakat dunia, pada masa lalu, kini dan di masa mendatang, sehingga kemudian dapat dikatakan bahwa kejahatan sebagai *a universal phenomenon*.<sup>3</sup>

Menurut Bonger, arti kejahatan dipandang dari sudut formil (menurut hukum) adalah suatu perbuatan yang oleh masyarakat harus diberi pidana. Selanjutnya ia juga mengatakan bila ditinjau lebih dalam, suatu kejahatan merupakan sebagian dari perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan norma kesusilaan yang hidup dan tumbuh di lingkungan masyarakat (dalam hal ini disebut sebagai Negara).<sup>4</sup>

---

<sup>1</sup> Kartini Kartono. 1992. *Patologi Sosial, Jilid I Edisi Baru*. Jakarta. Rajawali Press. Hal.134.

<sup>2</sup> Andi Matalata. 1987. "Santunan Bagi Korban", dalam J.E. Sahetapy. *Viktimologi Sebuah Bunga Rampai*. Jakarta. Pustaka Sinar Harapan. Hal. 35.

<sup>3</sup> Barda Nawawi Arief. 1994. *Kebijakan Legislatif dalam Penanggulangan Kejahatan dengan Hukum Pidana*. Semarang. Ananta. Hal. 2.

<sup>4</sup> W.A. Bonger. 1981. *Pengantar Tentang Kriminologi*. Jakarta. PT. Pembangunan Ghalia Indonesia. Hal. 21.

Kejahatan bukan merupakan bawaan sejak lahir dan juga bukan merupakan warisan biologis, namun kejahatan dapat disebabkan oleh faktor sosiologis.<sup>5</sup> Kejahatan merupakan kenyataan sosial yang ada di dalam kehidupan masyarakat, sebagaimana yang telah dikemukakan oleh Arif Gosita bahwa masalah kriminilitas merupakan suatu kenyataan sosial yang tidak berdiri sendiri, tetapi berkaitan dengan masalah sosial, ekonomi, politik, dan budaya, sebagai fenomena yang ada dalam masyarakat dan saling mempengaruhi satu sama lain.<sup>6</sup>

Kejahatan dalam arti kriminologis adalah setiap tindakan yang bersifat tidak susila dan merugikan, menimbulkan banyak ketidaktenangan dalam suatu masyarakat tertentu, sehingga masyarakat berhak untuk mencelanya dan menyatakan penolakan atas tindakan tersebut dalam bentuk nestapa yang dengan sengaja diberikan karena tindakan tersebut.<sup>7</sup>

Dalam upaya penanggulangan kejahatan (*criminal policy*), hingga saat ini hukum pidana masih menjadi sarana yang amat penting.<sup>8</sup> Penggunaan hukum pidana sebagai sarana penanggulangan kejahatan, dalam implementasinya pada tahap kebijakan aplikatif dan eksekutif, dilaksanakan melalui mekanisme sistem peradilan pidana, yaitu suatu sistem yang secara bersama-sama melibatkan Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan, dan Lembaga Pemasyarakatan. Tujuan dari sistem ini adalah

---

<sup>5</sup> Topo Santoso, Eva Achjani Zulfa. 2001. *Kriminologi*. Jakarta. PT Raja Grafindo Persada. Hal. 12.

<sup>6</sup> Arif Gosita. 2004. *Masalah Korban Kejahatan*. Jakarta. Bhuana Ilmu Populer. Hal. 2.

<sup>7</sup> Roeslan Saleh. 1983. *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*. Jakarta. Aksara Baru. Hal. 17.

<sup>8</sup> Barda Nawawi Arief. 1996. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Bandung. PT Citra Aditya Bakti. Hal. 4.

berupa: 1) resosialisasi (jangka pendek); 2) penanggulangan kejahatan (jangka menengah), dan 3) kesejahteraan sosial (jangka panjang). Sistem ini mendapat *input* berupa kejahatan dari masyarakat, dan nantinya setelah melalui proses peradilan pidana akan dikembalikan lagi pada masyarakat yang mana hal ini dianggap sebagai sebuah *output* dari serangkaian penanggulangan kejahatan tersebut.<sup>9</sup>

Dengan demikian peran masyarakat menjadi penting dalam proses penanggulangan kejahatan, karena seperti yang telah dijelaskan bahwa kejahatan itu tumbuh dan kemudian muncul oleh karena adanya kesenjangan di dalam masyarakat, maka masyarakat juga harus ikut bertanggung jawab dalam pengembaliannya pada lingkungan masyarakatnya sebagai bentuk dari *output* yang diharapkan dapat menanggulangi kejahatan secara signifikan.

Dalam rangka pembaharuan sistem dan pelaksanaan pidana di Indonesia, maka istilah sistem kepenjaraan telah diubah menjadi sistem pemasyarakatan, dan istilah penjara diganti menjadi lembaga pemasyarakatan. Demikian pula dalam hal mengenai perlakuan terhadap narapidana, mengalami perubahan sistem dari semula pembalasan menjadi pembinaan. Karena pembinaan narapidana berdasarkan sistem pemasyarakatan dibentuk sedemikian rupa untuk bertujuan agar narapidana menjadi masyarakat yang baik dan bertanggung jawab, menyadari kesalahan yang telah diperbuat dan diharapkan tidak akan lagi

---

<sup>9</sup> Muladi. 1995. *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*. Semarang. UNDIP. 1995. Hal.13.

melakukan atau mengulangi (*recidive*) perbuatan yang melanggar hukum.<sup>10</sup>

Kemudian berbicara tentang dasar pelaksanaan pidana penjara yang semula diatur dalam “*Gestichten Reglemen*” atau Reglemen Penjara, Stb tahun 1971, no. 708, tanggal 10 Desember 1917. Namun sejak berlakunya Undang-Undang No. 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan (selanjutnya disebut UU No. 12/1995), maka Reglemen Penjara sudah tidak berlaku lagi. Dalam rangka pembaharuan sistem pelaksanaan pidana penjara maka pada tahun 1964, istilah sistem kepenjaraan telah diubah menjadi sistem pemasyarakatan,<sup>11</sup> dan istilah penjara diganti menjadi lembaga pemasyarakatan.<sup>12</sup>

Di samping itu dengan disetujuinya instrumen hukum internasional seperti *Standard Minimum Rules of The Treatment of Offender (SMR)*, pada tahun 1955, *Body of Principles for the Protection of All Persons Under any Form of Detention or Imprisonment*, tahun 1988, dan *Basic Principles for the Treatment of Prisoners* tahun 1990 maka upaya

<sup>10</sup> Rahmat Hi. Abdullah. 2015. *Urgensi Penggolongan Narapidana dalam Lembaga Pemasyarakatan*. Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum Volume 9 No. 1. Hal. 50

<sup>11</sup> Sistem Pemasyarakatan adalah suatu tatanan mengenai arah dan batas serta cara pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan berdasarkan Pancasila yang dilaksanakan secara terpadu antara pembina, yang dibina dan masyarakat untuk meningkatkan kualitas Warga Binaan Pemasyarakatan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga negara yang baik dan bertanggung jawab (UU No. 12/1995 Tentang Pemasyarakatan Pasal 1 ke – 2).

<sup>12</sup> Lembaga Pemasyarakatan adalah tempat untuk melaksanakan pembinaan narapidana dan anak didik pemasyarakatan (UU No. 12/1995 Tentang Pemasyarakatan Pasal 1 ke – 3).

pembaharuan sistem pelaksanaan pidana penjara juga menjadi perhatian di Indonesia.<sup>13</sup>

Hampir semua Undang-Undang yang ada di Indonesia memuat sanksi Pidana penjara, yang bertujuan untuk menakut-nakuti masyarakat.<sup>14</sup> Dari seluruh ketentuan KUHP yang memuat delik kejahatan yaitu sejumlah 587, pidana penjara tercantum di dalam 575 perumusan delik ( $\pm 97,96\%$ ), baik dirumuskan secara tunggal maupun dirumuskan secara alternatif dengan jenis-jenis pidana lainnya.<sup>15</sup> Hal ini menunjukkan bahwa di Indonesia, pidana penjara merupakan salah satu sanksi yang diharapkan dapat menimbulkan efek jera terhadap pelaku tindak pidana, dan diharapkan dapat menjadi cara untuk menekan angka kejahatan yang terjadi.

Pelaksanaan pidana penjara dan perlakuan terhadap sistem untuk pembinaan terhadap narapidana, dijalankan dengan pembinaan melalui proses penahanan baik *proto type dua purpose* dan *proto type multy purpose* sejak narapidana telah mencapai tingkat pengawasan minimum (*minimum security*).<sup>16</sup> Dilihat dari segi keamanan dan pembinaan terhadap

---

<sup>13</sup> Di Negeri Belanda sendiri sebagai asal KUHP (WvS) dan Reglemen Penjara (Gestichten Reglement), sebagai konsekuensi dari perubahan WvS Belanda, peraturan kepenjaraan di negeri tersebut juga telah dirubah, yaitu dengan Wet 21 Desember 1951, Stb. 596. Titik sentral dalam perubahan tersebut terdapat dalam Pasal 26, yang menentukan bahwa dengan mempertahankan sifat dari pidana atau tindakan, maka pelaksanaannya juga diarahkan pada persiapan pengembalian narapidana ke dalam kehidupan masyarakat bebas. A. Soemadipradja dan Romli Atmasasmita. 1979. Sistem Pemasyarakatan di Indonesia. Bandung. Bina Cipta. Hal. 4.

<sup>14</sup> Wahyudi Kurniawan, dalam Perkuliahan Kapita Selekt Hukum Pidana. Tanggal 23 Oktober 2017.

<sup>15</sup> Barda Nawawi Arief. 2010. *Kebijakan Legislatif Dalam Penanggulangan Kejahatan Dengan Pidana Penjara*. Yogyakarta. Hal. 71.

<sup>16</sup> Aruan Sakidjo dan Bambang Poernomo. 1990. *Hukum Pidana Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Kodifikasi*. Yogyakarta. Ghalia Indonesia. Hal. 85.

narapidana di Lembaga Pemasyarakatan serta untuk menjaga pengaruh negatif yang dapat berpengaruh terhadap narapidana lainnya maka penting untuk adanya penggolongan narapidana.<sup>17</sup>

Dalam Pasal 12 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, yang berbunyi :

(1) Dalam rangka pembinaan terhadap Narapidana di LAPAS dilakukan penggolongan atas dasar:

- a. Umur;
- b. Jenis kelamin;
- c. Lama pidana yang dijatuhkan;
- d. Jenis kejahatan; dan
- e. Kriteria lainnya sesuai dengan kebutuhan atau perkembangan pembinaan.

(2) Pembinaan Narapidana Wanita di LAPAS dilaksanakan di LAPAS Wanita.

Sehubungan dengan hal tersebut, maka perlu dilakukan klasifikasi atau penjabaran lebih lanjut mengenai karakteristik dan kondisi narapidana. Karakteristik narapidana dapat dilihat dari sisi umur, jenis kelamin, jenis kejahatan, dan lamanya pidana yang dijatuhkan. Dari sisi umur terdapat narapidana anak-anak dan narapidana dewasa, sedangkan menyangkut dari segi jenis kelamin, maka narapidana terdiri dari narapidana pria dan narapidana wanita yang lebih lanjut ditegaskan

---

<sup>17</sup> Rahmat Hi. Abdullah. *Op.Cit.* Hal. 53

lagi dalam Pasal 12 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan.

Adapun penggolongan narapidana sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 12 Undang-Undang No 12 Tahun 1995 dinilai sangat perlu, baik dilihat dari segi keamanan dan pembinaan serta menjaga pengaruh negatif yang dapat berpengaruh terhadap narapidana lainnya. Berdasarkan penggolongan umur, dimaksudkan penempatan narapidana di dalam Lembaga Pemasyarakatan hendaknya dikelompokkan sesuai dengan usianya tidak jauh berbeda, misalnya Lembaga Pemasyarakatan Anak (yang selanjutnya disebut sebagai : Lapas Anak). Sedangkan penggolongan berdasarkan jenis kelamin dimaksudkan penetapan narapidana di dalam Lembaga Pemasyarakatan seharusnya dipisahkan antara lapas laki-laki dan lapas wanita.

Namun pada kenyataannya, bahwa di dalam LAPAS Klas I Malang, masih terdapat narapidana anak (yang selanjutnya disebut sebagai : Anak Pidana). Menurut Hadie, S.H. (Kepala Seksi Bimkemas Lembaga Pemasyarakatan Klas I Lowokwaru Malang) hal ini dikarenakan karena adanya pertimbangan kebijakan yang diberikan kepada Anak Pidana, agar tetap dekat dengan keluarga yang ingin menjenguk. Oleh karena itu mereka tidak ditempatkan di Lembaga Pemasyarakatan Anak (selanjutnya disebut sebagai : Lapas Anak). Yang mana pada pembinaannya, tidak ada pembinaan khusus yang diberikan terhadap Anak Pidana, karena mengingat minimnya petugas yang ada di LAPAS Klas I Malang yang

berpengalaman untuk melakukan pembinaan khusus Anak Pidana dan tidak adanya program khusus yang dibentuk guna pembinaan Anak Pidana. Memang seharusnya Anak Pidana ditempatkan di LAPAS Anak guna pembinaan yang lebih maksimum.<sup>18</sup>

Kemudian diatur lebih lanjut, sehubungan dengan adanya klasifikasi berdasarkan jenis kelamin, dalam *Standard Minimum Rules of The Treatment of Offender* ditentukan, bahwa: “Pria dan wanita sejauh mungkin harus ditahan di lembaga-lembaga terpisah dalam suatu lembaga yang menerima bukan saja pria tetapi juga wanita keseluruhan gedung yang dialokasikan untuk wanita harus sama sekali terpisah”.<sup>19</sup> Dalam pelaksanaannya, di LAPAS Klas I Malang, tidak ada Narapidana Wanita, karena mereka sudah ditempatkan secara terpisah dari Narapidana Laki-Laki di Lembaga Pemasyarakatan Wanita Klas II Malang (selanjutnya disebut LAPAS Klas II Wanita Malang).

Penggolongan berdasarkan lama pidana yang dijatuhkan, terdiri dari<sup>20</sup>:

- 1) Golongan B1 : Narapidana dengan jangka pendek, yaitu narapidana yang dipidana paling lama 3 (tiga) bulan;
- 2) Golongan B2 : Narapidana dengan pidana jangka sedang, adalah narapidana yang dipidana paling singkat 3 (tiga) bulan dan paling lama 1 (satu) tahun;

---

<sup>18</sup> Wawancara dengan Hadie Wiyono, S.H. Kepala Seksi Bimkemasy Lembaga Pemasyarakatan Lowokwaru Malang. 26 Oktober 2017.

<sup>19</sup> Lihat Pasal 8, dalam *Standard Minimum Rules (SMR)*. Tentang Hak-Hak Narapidana.

<sup>20</sup> Wawancara dengan Joko, S.H. Kepala Seksi Registrasi Lembaga Pemasyarakatan Lowokwaru Malang. 26 Oktober 2017.



- 3) Golongan B3 : Narapidana dengan pidana jangka panjang, yaitu narapidana yang dipidana di atas 1 (satu) tahun.

Maka dengan melihat dan melakukan pembinaan dari segi lamanya pidana, sehingga diharapkan pembinaan yang dilakukan dapat memberikan program yang sesuai dengan lama pidana yang dijalani oleh narapidana tersebut. Dalam pelaksanaannya di dalam LAPAS Klas I Malang, pembinaan yang diberikan terhadap Warga Binaan Pemasyarakatan (selanjutnya disebut sebagai : WBP) berdasarkan segi lamanya pidana dirasa kurang maksimum. Dikarenakan *control* yang sudah mulai sulit dilakukan mengingat sangat terbatasnya jumlah petugas yang bertugas untuk menjalankan program pembinaan yaitu hanya sekitar  $\pm 20$  petugas LAPAS. Hal ini dinilai sangat kurang mengingat saat ini WBP di LAPAS Klas I Malang sudah mencapai 2.400 jiwa.<sup>21</sup>

Jenis kejahatan juga merupakan salah satu karakteristik dalam pembinaan narapidana. Untuk itu di dalam melakukan pembinaan terhadap narapidana haruslah dipisah-pisahkan berdasarkan jenis kejahatannya, seperti narkoba, pencurian, penipuan, penggelapan, pembunuhan dan lain-lain. Hal ini dilakukan untuk menghilangkan *prisonisasi*.<sup>22</sup> Sebagaimana dikemukakan oleh Djisman Samosir, memang harus diakui bahwa di dalam penjara terjadi *prisonisasi* atas narapidana, artinya

<sup>21</sup> Wawancara dengan Hadie Wiyono, S.H. Kepala Seksi Bimkemasy Lembaga Pemasyarakatan Lowokwaru Malang. 26 Oktober 2017.

<sup>22</sup> *Prisonitation* (Prisonisasi) adalah istilah yang digunakan oleh TP. Morris dalam bukunya yang berjudul "*Pentoville*" (1963) untuk menggambarkan tingkah laku nyata narapidana yang bertujuan untuk menyesuaikan diri dengan kehidupan penjara namun sebenarnya mereka menolak untuk mentaati aturan.

narapidana itu terpengaruh oleh nilai-nilai yang hidup di penjara seperti kebiasaan-kebiasaan dan budaya di penjara tersebut.<sup>23</sup> Selanjutnya Tongat mengatakan upaya ini dilakukan atas pertimbangan untuk memperkecil kemungkinan komunikasi antara penjahat kelas kakap dengan para penjahat semula.<sup>9</sup> Adapun tujuannya mencegah agar tidak terjadi pemaksaan maupun pengaruh antara narapidana yang satu dan narapidana lainnya, maupun bentuk pemerasan terlebih-lebih prisonisasi. Untuk itu maka narapidana ditempatkan dalam ruangan yang berbeda-beda sesuai dengan jenis kejahatan yang mereka lakukan. Berdasarkan jenis kejahatan ini maka seharusnya dilakukan pembinaan yang sesuai dengan narapidana agar dapat mengembalikan narapidana menjadi manusia yang baik dan berguna.<sup>24</sup>

Dalam kenyataannya, pembinaan berdasarkan jenis kejahatan umum seperti yang disebutkan diatas, dengan jenis kejahatan tindak pidana khusus seperti Narkotika, Korupsi dan Terorisme, hanya ada pemisahan Blok saja. Namun dalam kenyataannya, dalam pelaksanaannya antara WBP tindak pidana Narkotika, Korupsi, Terorisme dan tindak pidana kejahatan umum masih disamakan. Artinya disini tidak ada perbedaan antara jenis kejahatan dalam hal pembinaan khusus yang diberikan oleh petugas LAPAS Klas I Malang. Kemudian dalam hal pembinaan yang dilakukan di dalam Blok atau sel yaitu pembinaan kemandirian meliputi atas kebersihan sel, kerohanian, dsb. Menurut jenis

---

<sup>23</sup> Suwanto, Jurnal Equality. 2007. Vol. 12 No. 2. *Ide Individualisasi Pidana Dalam Pembinaan Narapidana Dengan Sistem Pemasyarakatan.*

<sup>24</sup> Rahmat Hi. Abdullah. *Op.Cit.* Hal. 55.

kejahatan umum, WBP masih bercampur aduk menjadi satu di dalam satu sel. Hal ini erat kaitannya dengan dampak yang ditimbulkan karena adanya *over capacity* yang ada di LAPAS Klas I Malang.

Jika dilihat idealnya dari Pasal 12 Undang-Undang No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan ini, maka narapidana ditempatkan dan dibina berdasarkan karakteristiknya sebagaimana telah dijelaskan di atas, sehingga tujuan pembinaan dapat tercapai dengan baik. Namun, dalam pelaksanaannya dapat dilihat ketidaksesuaian pelaksanaan dengan isi Pasal 12 sebagaimana yang tercantum dalam Undang-Undang No. 12 Tahun 1995 tersebut, karena jumlah narapidana yang melebihi kapasitas sehingga penempatan narapidana berdasarkan umur, jenis kejahatan, dan lamanya pidana tidak dapat terwujud. Demikian juga dalam hal pembinaan narapidana, tidak dipisah-pisahkan antara narapidana narkoba dengan narapidana pencurian maupun yang lainnya, sehingga bentuk dan cara pembinaannya sama untuk seluruh narapidana.

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, penulis tertarik untuk mengkaji dan membahas lebih lanjut serta mengangkat kajian ini kedalam suatu bentuk suatu karya ilmiah dengan judul yaitu : **“Analisis Yuridis Sosiologis Pelaksanaan Sistem Pembinaan Narapidana dengan Pola Individual Ditinjau dari Pasal 12 Undang-Undang No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan”**.

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana pelaksanaan “pola individual” dalam Pasal 12 Undang-Undang No. 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan pada Lembaga Pemasyarakatan Klas I Malang?
2. Apa saja hal yang menjadi hambatan dan pendukung dalam pelaksanaan “pola individual” dalam Pasal 12 Undang-Undang No. 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan pada Lembaga Pemasyarakatan Klas I Malang?

## **C. Tujuan Penelitian**

Dalam suatu penelitian, pastilah ada tujuan yang hendak dicapai sebagai pemecahan atas berbagai masalah yang diteliti (tujuan obyektif) dan untuk memenuhi kebutuhan perorangan (tujuan subyektif). Tujuan penelitian ini diperlukan karena berkaitan erat dengan rumusan masalah untuk memberikan arah yang tepat dalam penelitian, sehingga penelitian ini dapat berjalan sesuai dengan apa yang dikehendaki. Adapun tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk melihat dan menganalisa bagaimana pelaksanaan “pola individual” dalam Pasal 12 Undang-Undang No. 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan pada Lembaga Pemasyarakatan Klas I Malang.
2. Untuk mengetahui hal yang menjadi hambatan dan pendukung dalam pelaksanaan “pola individual” dalam Pasal 12 Undang-Undang No. 12

Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan pada Lembaga Pemasyarakatan  
Klas I Malang.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat yang dapat diambil dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

##### **1. Manfaat Teoritis**

- a. Memberikan masukan bagi perkembangan ilmu pengetahuan hukum khususnya Hukum Pidana, disamping itu hasil ini dapat memperbanyak referensi ilmu di bidang pembinaan narapidana di Lembaga Pemasyarakatan.
- b. Menambah bahan referensi di bidang karya ilmiah serta bahan masukan bagi penelitian sejenis yang akan datang.

##### **2. Manfaat Praktis**

- a. Memberikan jawaban atas permasalahan yang menjadi pokok pembahasan dalam penelitian ini
- b. Memberikan sumbangan pemikiran dan bahan masukan bagi pihak-pihak yang terkait dalam pelaksanaan “pola individual” dalam Pasal 12 Undang-Undang No. 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan pada Lembaga Pemasyarakatan Klas I Malang.

## **E. Kegunaan Penelitian**

### **a. Bagi Penulis**

Hasil penelitian oleh Penulis ini diharapkan dapat menjadikan pijakan baru dibidang ilmu hukum bagi Penulis dan dapat menambah wawasan dan ilmu pengetahuan mengenai pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan, khususnya pada pelaksanaan “pola individual” dalam Pasal 12 Undang-Undang No. 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan pada Lembaga Pemasyarakatan Klas I Malang.

### **b. Pembuat Kebijakan**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran bagi pembuat kebijakan antara pemerintah, terhadap kasus mengenai pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan, khususnya pada pelaksanaan “pola individual” dalam Pasal 12 Undang-Undang No. 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan pada Lembaga Pemasyarakatan Klas I Malang.

### **c. Bagi Akademisi**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan bagi semua pihak sebagai bahan untuk merumuskan penelitian lebih lanjut mengenai pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan, khususnya pada pelaksanaan “pola individual”

dalam Pasal 12 Undang-Undang No. 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan pada Lembaga Pemasyarakatan Klas I Malang.

## **F. Metode Penelitian**

Metode penelitian adalah langkah dalam menentukan jenis metode penelitian apa yang dipergunakan dalam penulisan penelitian ini, guna memperoleh data atas apa yang akan dibahas dalam penelitian dengan tepat, akurat dan benar. Sehingga dapat memudahkan dalam mempelajari dan menganalisa data yang diperoleh dalam penelitian. Sesuai dengan judul dari penelitian ini, maka metode yang digunakan oleh penulis adalah sebagai berikut :

### **1. Pendekatan Penelitian**

Penulis memfokuskan penelitian untuk menggunakan metode pendekatan Yuridis Sosiologis yakni suatu pendekatan masalah dengan mengkaji peraturan yang berlaku dibandingkan dengan pelaksanaan ketentuan yang ada di lapangan. Penulis akan mengkaji tentang pelaksanaan “pola individual” dalam Pasal 12 Undang-Undang No. 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan pada Lembaga Pemasyarakatan Klas I Malang.

### **2. Lokasi Penelitian**

Lokasi Penelitian yang penulis tetapkan dalam melakukan penelitian ini adalah di Lembaga Pemasyarakatan Klas I Malang. Karena Lembaga Pemasyarakatan Klas I Malang sudah melaksanakan ketentuan perUndang-Undangan yang ada dalam Pasal 12 Undang-

Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan, meskipun belum secara maksimal dikarenakan oleh berbagai macam hal-hal yang sifatnya menghambat.

### **3. Sumber Data Penelitian**

#### **a. Data Primer**

Data yang diperoleh secara langsung sebagai hasil penelitian lapangan yang dilakukan melalui wawancara dengan Kabid Registrasi, Kabid Bimkemasy dan Petugas Tata Usaha Lembaga Pemasyarakatan Klas I Malang.

#### **b. Data Sekunder**

Data yang diperoleh dengan cara mempelajari buku-buku dan tulisan para ahli serta peraturan yang berkaitan dengan masalah yang dibahas terdiri dari Undang-Undang No.12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, PP No.31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan, KUHP, KUHAP, *Standard Minimum Rules of The Treatment of Offender (SMR)* tahun 1955, buku, majalah, jurnal serta literatur yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan oleh Penulis.

### **4. Teknik Pengumpulan Data**

Untuk memperoleh data dalam penelitian ini, penulis menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut :



## 1) Teknik Pengumpulan Data Primer

### a. Wawancara

Wawancara dilakukan penulis secara bebas terpimpin yang dilakukan penulis dengan mempersiapkan pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan, dan dimungkinkan dalam wawancara berlangsung dapat mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang sudah disiapkan dapat ditanyakan secara langsung kepada responden, yaitu Bapak Syukron Hamdani, Amd.I.P., S.Ag., M.M. Kepala Bidang Pembinaan Narapidana Lembaga Pemasyarakatan Klas I Malang, Bapak Djoko Waluyo, S.Psi., Sugeng Aji P.S.H., M.H., Kasub Bagian Umum Lembaga Pemasyarakatan Klas I Malang, Ir. Hermin Yulianti, M.H. Staff SDP Lembaga Pemasyarakatan Klas I Malang, Ricky Hermawan, A.Md. Staff KPLP (Kesatuan Pengamanan Lembaga Pemasyarakatan) Lembaga Pemasyarakatan Klas I Malang.

### b. Observasi

Observasi akan dilakukan Penulis dengan mengamati secara langsung lokasi penelitian yang terkait dengan tempat pembinaan di dalam Lembaga Pemasyarakatan Klas I Malang yaitu Blok/Sel, Masjid, Bengkel dan Gudang benih Jamur yang bertujuan untuk menemukan data-data yang terkait secara langsung, sehingga dapat dipastikan keakuratan hasil penelitian.

### c. Dokumentasi

Dokumentasi secara tertulis maupun cetak, yang didapatkan melalui wawancara atau web resmi, terkait dengan data petugas maupun Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) akan dilakukan/didapatkan penulis guna mengingat data yang akan digunakan guna kepentingan keakuratan penelitian.

## 2) Teknik Pengumpulan Data Sekunder

Teknik pengumpulan data sekunder dalam penelitian ini diperoleh melalui :

### a. Studi Kepustakaan

Cara pengumpulan data atau bahan-bahan hukum yang diperoleh penulis dari buku-buku, peraturan perUndang-Undangan yang berlaku, karya ilmiah, dan artikel yang terkait dengan permasalahan dalam penelitian ini yang akan digunakan penulis sebagai dasar informasi dan pertimbangan yang berkaitan dengan penelitian ini.

### b. Penelusuran Internet

Cara pengumpulan data atau bahan-bahan hukum yang diperoleh dari situs-situs, karya tulis, jurnal yang bersifat online, yang berkaitan dengan penelitian ini.

## 5. Teknik Analisa Data

Dalam menganalisis data, Penulis menggunakan teknik analisis Deskriptif Kualitatif yaitu suatu analisis data secara jelas serta

diuraikan dalam bentuk kalimat sehingga diperoleh gambaran yang jelas dan menyeluruh untuk kemudian dapat ditarik sebuah kesimpulan secara khusus yang berkaitan dengan pelaksanaan “pola individual” dalam Pasal 12 Undang-Undang No. 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan pada Lembaga Pemasyarakatan Klas I Malang.

### **G. Sistematika Penulisan**

Untuk mempermudah dan memahami skripsi ini secara keseluruhan, maka sistematika penulisannya sebagai berikut:

#### **BAB I : PENDAHULUAN**

Bab ini merupakan pendahuuan yang memuat latar belakang masalah, permasalahan dan ruang lingkup, tujuan dan kegunaan penulisan, serta menguraikan tentang sistematika penulisan.

#### **BAB II : TINJAUAN PUSTAKA**

Bab ini menjelaskan tentang ketentuan-ketentuan, teori-teori yang terkait dengan pelaksanaan Pasal 12 Undang-Undang No. 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan pada Lembaga Pemasyarakatan Klas I Malang.

#### **BAB III : METODE PENELITIAN**

Bab ini memuat tentang pendekatan masalah, sumber dan jenis data, prosedur pengumpulan dan

pengolahan data, serta tahap akhir berupa analisis data.

#### **BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Bab ini merupakan pembahasan tentang hasil analisis data yang telah diolah dengan ketentuan perUndang-Undangan, untuk kemudian diambil sebuah kesimpulan yang berkaitan dengan jawaban rumusan masalah.

#### **BAB V : PENUTUP**

Bab ini berisi tentang kesimpulan dan saran dari hasil penelitian.

